

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Secara geografis, Indonesia adalah salah satu negara yang termasuk daerah rawan bencana. Hal ini dikarenakan Indonesia berada diposisi pertemuan tiga lempeng Tektonik, yaitu: lempeng Eurasia, India Australia, dan Samudra Pasifik. Sehingga berpotensi besar terjadinya bencana alam. Seperti yang dijelaskan dalam laman BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) (26 Februari 2018), “Indonesia juga berada pada pertemuan tiga sistem pegunungan Alpine Sunda, Circum Pasific, dan Circum Australia, dengan jumlah pegunungan yang tersebar sebanyak 500 gunung api dan 128 diantaranya merupakan gunung api yang aktif sehingga berpotensi terjadi bencana alam letusan gunung api yang tersebar Pada bagian selatan dan timur Indonesia terdapat sabuk vulkanik (vulcanic arc) yang memanjang dari pulau Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, dan Sulawesi, yang sisanya berupa pegunungan vulkanik tua dan dataran rendah mendominasi rawa-rawa”.

“Menurut Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, yaitu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam (natural disaster) atau non-alam maupun faktor manusia (man-made disaster) sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis”.

Selama berdirinya Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat angka kejadian bencana pada tahun 2017 yang meningkat dari tahun sebelumnya. Bencana yang terjadi menunjukkan 92% kejadian bencana yang terjadi di Indonesia. Bencana alam ini pun dikategorikan bencana hidrometeorologi, yang mana bencana alam diperoleh dari hujan lebat disepanjang musim penghujan. Sehingga menyebabkan bencana banjir dan tanah longsor, angka kejadian ini tercatat sebanyak 2.384 bencana alam yang ada di Indonesia sepanjang tahun 2017. Pada angka ini pun

meningkat dari tahun 2015 yang tercatat kejadian bencana sebanyak 1.732 kejadian bencana.

Penelitian ini akan berfokus pada strategi komunikasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang yang berperan sebagai salah satu instansi kelembagaan yang bergerak untuk mensosialisasikan bencana banjir. BPBD merupakan lembaga Pemerintah yang menjadi penggerak dalam penanggulangan bencana dengan kegiatan Pencegahan Bencana, Tanggap Darurat dan Rehabilitas. BPBD berada dibawah pengawasan Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Lembaga Pemerintah.

Dari data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik diperoleh informasi bahwa pada tren kejadian bencana 5 tahun terakhir yaitu pada tahun 2016, 2017, dan 2021 untuk Kota Padang mengalami intensitas naik turun. Tren kejadian bencana banjir pada tahun 2017 memiliki angka banjir paling tinggi yaitu sebanyak 27 kali di seluruh kecamatan di Kota Padang, beda halnya pada tahun 2016 terjadi bencana banjir sebanyak 11 kali diseluruh kecamatan di Kota Padang, untuk di tahun 2021 Kota Padang mengalami penurunan dari tahun 2017 pada bencana banjir yaitu terjadi 24 kali diseluruh kecamatan di Kota Padang. Terlihat pada data tabel dibawah ini kejadian bencana banjir kota Padang:

Tabel 1.1. Data Banjir Kota Padang

No	Kecamatan	2016	2017	2021
1	Bungus Teluk Kabung	0	2	0
2	Lubuk Kilangan	0	1	1
3	Lubuk Begalung	3	3	2
4	Padang Selatan	1	8	1
5	Padang Timur	0	1	1
6	Padang Barat	1	3	0
7	Padang Utara	0	4	1
8	Nanggalo	2	2	1
9	Kuranji	3	2	2
10	Pauh	0	1	0
11	Koto Tangah	1	0	15
Total		11	27	24

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Padang

Pada tanggal 13 Juli 2023, pukul 19.30 WIB, Kota Padang dilanda hujan dengan intensitas tinggi dalam durasi yang panjang disertai angin dari malam hingga siang hari (tanggal 14 Juli 2024 pukul 14.00 WIB). Curah hujan yang terjadi merupakan tertinggi setelah tahun 2016 sebesar 275 mm/hari (tercatat di Pos Hujan BWS Sumbar) dan 218 mm per 9 jam (tercatat di Pos Hujan gunung Nago). Selain itu juga terjadi air pasang yang mencapai puncaknya di jam 03.00 WIB setinggi 1,2 meter, sehingga air dari saluran sungai tidak bisa masuk atau tertahan menuju laut. Hal ini yang menyebabkan genangan/banjir pada beberapa wilayah di Kota Padang. Adapun data yang dihimpun oleh Pusat Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) Kota Padang adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2. Data Banjir Tanggal 13 Januari 2023

No	Kecamatan	Lokasi
1	Nanggalo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumahan Griya Kubu Utama Kelurahan Tabiang Banda Gadang (ketinggian air \pm 60 cm) 2. Pinggir Sungai dekat SMP 29 Kel. Kurao Pagang (ketinggian air \pm 200 cm)
2	Lubuk Begalung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gurun Laweh RT 05 RW 01 No. 79 2. Komplek Perumahan Kharisma, Kelurahan Koto Baru Nan XX 3. RT. 01/01 Dekat SD 12 Kel. Tanah Sirah, Ketinggian air \pm 200 cm
3	Padang Utara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Depan SDN 03 Jalan Gajah Mada, Kelurahan Alai Parak Kopi (ketinggian air \pm 50 cm) 2. Jl. Palangkaraya No. 2, Ulak Karang Selatan (ketinggian air \pm 30 cm)
4	Padang Selatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jalan Kampung Nias 1 Kelurahan Ranah Parak Rumbio (ketinggian air \pm 50 cm) 2. Jalan Raya Jondul Rawang (ketinggian air \pm 100 cm) 3. Jl. Pemancungan No. 26 belakang SDN 32/27 Pemancungan, Kelurahan Pasa Gadang 4. Depan Puskesmas Kel. Seberang Padang, ketinggian air \pm 120 cm

5	Padang Timur	<ol style="list-style-type: none"> 1. RW 06, Kelurahan Gantiang Parak Gadang (ketinggian air \pm 50 cm) 2. Jl. Jati Rawang RT 01 RW 01, masuk dari rumah Makan Abak, Kelurahan Jati (ketinggian air \pm 100 cm) 3. RW 10 di 5 RT Kelurahan Gantiang Parak Gadang
6	Padang Barat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jl. Karet Bandar Purus 6, Kelurahan Purus 2. RT. 07, 08, 09 Komplek Perumahan Monang Kel. Air Tawar Barat, ketinggian air \pm 100 cm
7	Koto Tangah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jl. Merpati, RT 05 RW 11, Kelurahan Dadok Tunggul Hitam 2. Jln. Merpati, No.5 RT. 04 RW 04 Kelurahan Dadok Tunggul Hitam 3. Jl. Karang Putih, Kelurahan Dadok Tunggul Hitam 4. Gang Cendana 8 DPR Ujung, Kelurahan Dadok Tunggul Hitam 5. Jl. Cempaka 5 DPR Ujung, Kelurahan Dadok Tunggul Hitam 6. Belakang SD 29, Kelurahan Dadok Tunggul Hitam 7. Jl Cempaka 4 DPR Ujung, Kelurahan Dadok Tunggul Hitam 8. Jl. Cikarau, Kelurahan Dadok Tunggul Hitam 9. Jl. DPR ujung Gang Cempaka V, Kelurahan Dadok Tunggul Hitam 10. Jl. DPR utama Gang Topan, Kelurahan Dadok Tunggul Hitam 11. Jl. Parak Jambu 17 RT. 04/09 Kelurahan Dadok Tunggul Hitam 12. Jl. DPR ujung air pacah gang Cendana VII (loundry buk Ros) dan VIII, Kelurahan Dadok Tunggul Hitam 13. Perumahan Harmoni Kel. Dadok Tunggul Hitam,

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang

Adapun dampak yang terjadi dari kejadian banjir yang terjadi pada tanggal 13 Juli 2023 di beberapa kecamatan yang ada di Kota Padang seperti tabel dibawah ini:

Tabel 1.3. Data Korban Jiwa

No.	Kecamatan	Kelurahan/Lokasi	Jumlah (jiwa)				
			Hilang	Luka berat	Luka ringan	Pengungsi	Meninggal
1	Padang Barat	Olo (rumah Dinas Wakil Wali Kota)				20	
2	Padang Timur	Kelurahan Gantiang Parak Gadang (Rumah RW X)				10	
3	Koto Tangah	Dadok Tunggul Hitam				25	
		Maransi			2		
4	Lubuk Begalung	Pampangan				30	
5	Nanggalo	Kelurahan Kurao Pagang (SMPN 29)				1	

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang

Kota Padang merupakan salah satu kota yang terkenal dengan keindahan alamnya, tetapi juga memiliki tantangan dalam hal bencana banjir. Berdasarkan pernyataan dari BPBD Kota Padang beberapa daerah di kota ini, seperti Padang Utara, Padang Barat, Padang Selatan, Bungus, dan Koto Tangah, sering kali menjadi zona merah banjir. Topografi kota yang berbukit-bukit serta musim hujan yang intens dapat menyebabkan peningkatan risiko banjir di daerah-daerah ini. Banjir di sini dapat menyebabkan gangguan dalam kehidupan sehari-hari penduduk, merusak infrastruktur, dan mengganggu aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah dan berbagai pihak terkait terus berupaya meningkatkan sistem drainase, mengembangkan infrastruktur tahan banjir, dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang penanganan bencana banjir guna mengurangi dampak negatifnya.

Penanggulangan atau pencegahan bencana tentunya ada proses tahapan yaitu, prabencana, tanggapan darurat dan pascabencana. Semua proses tahapan tersebut memerlukan strategi komunikasi sehingga informasi pesan yang disampaikan oleh pihak BPBD tersampaikan dengan tepat ke masyarakat. Pada tahapan pra-bencana,

BPBD mempunyai peran untuk membuat peta area wilayah yang rawan akan bencana dan menjelaskan kepada masyarakat supaya mengetahui pencegahan serta tindakan saat sebelum terjadinya bencana. Tahapan selanjutnya, tanggapan darurat yang mana diperlukan tindakan tanggap dari BPBD, segera mengevakuasi korban bencana dan memberi pertolongan. Tahapan terakhir, yaitu pasca bencana terdapat program yang diberikan oleh BPBD dengan cara rehabilitas dan rekontruksi.

Mitigasi dibagi menjadi 2 jenis yaitu Mitigasi Struktural adalah upaya pengurangan resiko bencana yang dilakukan melalui pembangunan fisik ataupun perubahan pada lingkungan fisik. Contoh upaya dari mitigasi struktural adanya tindakan pengaturan kode etik yang mengacu oleh BPBD, konstruksi pada lingkungan tempat tinggal, relokasi struktur dan ketahanan konstruksi. Mitigasi Non-struktural adalah upaya pengurangan resiko bencana melalui pola pikir manusia, sikap manusia atau alam tanpa menggunakan struktur perencanaan. Contoh upaya dari mitigasi non struktural adanya penyelenggaraan Pendidikan, penyuluhan atau sosialisasi dan pelatihan secara konvensional maupun modern.

Mitigasi yang digunakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang yaitu sosialisasi kepada masyarakat, sehingga memberikan perubahan dalam meminimalisir korban maupun kerugian nantinya dan meningkatkan kephahaman masyarakat untuk mengatasi bencana khususnya bencana banjir. Untuk itu, guna menyikapi masalah tersebut, maka BPBD Kota Padang memerlukan suatu strategi komunikasi khusus dalam mensosialisasikan bencana, khususnya bencana banjir. Sehingga penanggulangan bencana banjir di Kota Padang dapat dilaksanakan secara optimal.

Menurut Effendi dan Onong (2003:301), strategi komunikasi adalah paduan dari perencanaan komunikasi (communication planning) dan manajemen komunikasi (communication management). Sehingga mencapai tujuan tersebut yaitu strategi komunikasi harus dapat menunjukkan bagaimana operasional secara taktik, dalam artian bahwa pendekatan (approach) bisa berbeda-beda sewaktu bergantung dari situasi dan kondisi.

Membuat rancangan komunikasi diartikan sama halnya merancang dan memperhitungkan situasi dan kondisi yang cermat untuk menempuh dan menghadapi masa yang akan datang. Sehingga nantinya tercapai dengan tujuan yang dirancang atau dengan kata lain bahwa menggunakan strategi komunikasi berarti menggunakan beberapa cara berkomunikasi secara sadar untuk menciptakan perubahan pada khalayak dengan mudah dan cepat.

Dalam penelitian ini berfokus dengan strategi komunikasi yang akan dilaksanakan oleh BPBD Kota Padang dalam melaksanakan perencanaan komunikasi, sehingga tercapai tujuan yang dirancangkan. Tentunya strategi komunikasi semacam ini menuntut koordinasi yang lebih baik diantara semua pihak, baik dari sektor pemerintah, swasta, masyarakat, badan-badan nasional dan lembaga-lembaga terkait lainnya.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pernyataan diatas, maka peneliti menetapkan rumusan masalah yaitu “Bagaimanakah strategi komunikasi yang akan dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang dalam Mensosialisasikan Siaga Bencana Banjir di Kota Padang?”

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui dan mendeskripsikan strategi komunikasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang dalam mensosialisasikan siaga bencana banjir di Kota Padang.

1.4. Manfaat Penelitian

Dengan penuh harapan dari peneliti dalam mengerjakan penelitian ini terdiri dari dua aspek yaitu:

1. Secara Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan bahan acuan penelitian lebih lanjut khususnya masalah strategi komunikasi.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi BPBD Kota Padang sebagai studi awal melaksanakan penelitian lebih lanjut, khususnya sebagai bahan evaluasi dalam melakukan kegiatan penanggulangan bencana banjir.